

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PENGOLAH SABUT KELAPA MELALUI INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Fariyana Kusumawati¹, Jakfar Sadik²

¹)Program Studi Akuntansi FEB Universitas Trunojoyo Madura

²)Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Trunojoyo Madura

Email: ¹)kfariyana@gmail.com, ²)jakfarsadik@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian berujuan untuk menyusun model pemberdayaan dan pengembangan usaha masyarakat pengolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep dan menyusun pembagian peran pemerintah daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Metode analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah *Importance Performance Analisis* (IPA) untuk mengukur hubungan antara tingkat permasalahan dan prioritas penanganan dalam pengembangan usaha masyarakat pengolah sabut kelapa dan *Partisipatory Rapid Appraisal* (PRA) untuk mengetahui Tehnologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat sekitar. Metoda PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis dengan metode *Importance Performance Analisis* (IPA) diperoleh gambaran tentang UMKM pengolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep performnya rendah dan masyarkat maupun pemerintah daerah menganggap ini penting sekali sehingga butuh penanganan dengan segera, yaitu: (1) peningkatan skill UMKM pengolah sabut kelapa, (2) penguatan kelembagaan UMKM pengolah sabut kelapa, (3) penguatan akses terhadap teknologi tepat guna, (4) pendampingan yang intensif (inkubator), dan (5) penguatan akses ke lembaga permodalan. Sedangkan hasil analisis melalui metode PRA menunjukkan bahwa model Model pengembangan UMKM pengolah sabut kelapa mengacu pada hasil kondisi eksisting dan kepentingan masyarakat sehingga terpilih Model Inkubator Bisnis dan Tekhnologi dalam pengembangan UMKM pengolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep.

Kata kunci: Pengolah sabut kelapa, Model Inkubator Bisnis

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan di Kabupaten Sumenep berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang merupakan indikasi kesanggupan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat serta kemajuan dan keberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan perbaikan kesejahteraan masyarakat sebagai garansi politik atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan konsisten mengupayakan pencapaiannya secara bertahap dan berkelanjutan. Indikator perbaikan kesejahteraan masyarakat, dengan tingkat penyelesaian masalah-masalah masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan aksesibilitas masyarakat yang mandiri secara sosial, ekonomi dan politik.

Mengacu teori Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) yang dikemukakan oleh Munir dan Fitanto, (2007), maka perencanaan pembangunan perekonomian di kabupaten Sumenep diusahakan untuk: (1). Memperkuat sistem ekonomi kerakyatan, (2). Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan guna pemulihan kondisi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan; (3). Peningkatan pendidikan, iptek serta kesehatan sebagai proses pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, terampil dan produktif dilandasi nilai agama dan budaya; (4). Percepatan pembangunan daerah tertinggal di daerah kepulauan dan daratan secara proporsional serta Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; (5). Pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat; dan (6). Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.

Upaya pengembangan perekonomian yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu melalui peran teknologi lokal yang maksimal dan berkelanjutan. Namun,. paradigma berfikir masyarakat masih berorientasi pada penggunaan sumber daya secara individualistis serta tidak lagi peka terhadap norma-norma lingkungan. Seluruh sumber daya di eksplorasi secara besar-besaran tanpa memikirkan keberlanjutannya. Beberapa riset membuktikan ternyata adanya teknologi canggih telah membantu mempercepat pengelolaan sumber daya alam dengan orientasi ekonomi kapitalistik. Hal ini akan terus mengalir jika tidak ada upaya untuk membendung pesatnya kemajuan teknologi yang tidak membumi tersebut. Peran serta pemerintah guna mendorong pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dinilai sangat penting untuk saat ini.

Pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumenep sangat memungkinkan untuk dilakukan, misalnya pengembangan ekonomi yang berbasis kelapa. Hal itu didukung data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep (2012) menunjukkan bahwa produksi kelapa di Kabupaten Sumenep tertinggi yaitu 18.399,58 ton dengan jumlah petani menurut kepala keluarga (KK) sebesar 297.656. Modal tersebut sesungguhnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumenep terutama masyarakat pedesaan. Pemanfaatan hasil perkebunan kelapa, selama ini yang dimanfaatkan hanya daging kelapa dan batoknya sehingga sabut kelapanya dibuang begitu saja atau hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Namun sebenarnya pemanfaatan sabut kelapa bisa ditingkatkan nilai ekonomisnya dengan menggunakan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya setempat.

Penelitian ini berkaitan dengan pengembangan UKMK pengolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep. Kajian dalam penelitian ini belum banyak dilakukan oleh peneliti untuk melihat dan memahami potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Sumenep khususnya masyarakat pengolah sabut kelapa. tujuan dalam penelitian ini yaitu (1) menentukan tingkat permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat pengolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep. (2) merumuskan rencana dan strategi penanganan yang harus dilakukan berdasarkan sklala prioritas kebutuhan masyarakat pengolah sabut kelapa di

Kabupaten Sumenep. (3) memberdayakan masyarakat pengolah sabut kelapa (UMKM) dalam upaya menemukan strategi pengembangan dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam pengolahan sabut kelapa sehingga dapat meningkatkan efektifitas, kreatifitas, dan kesejahteraan bagi masyarakat pengolah sabut kelapa atau dengan kata lain dapat meningkatkan kelangsungan hidup UMKM pegolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep serta (4) meningkatkan peran pemerintah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Basis Ekonomi

Dasar dari model ekonomi basis (*economic base model*) adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Artinya, suatu sektor dapat dikatakan sebagai sektor ekonomi basis jika: (Kurniyati, 2009).

1. Produk sektor tersebut selain memenuhi kebutuhan lokal wilayah juga memenuhi permintaan luar wilayah (di ekspor)
2. Produknya memiliki kontribusi besar, baik dari sisi pendapatan maupun tenaga kerja, terhadap pendapatan/tenaga kerja di wilayah yang lebih besar.

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999).

Menurut John Glasson (1990), teori basis ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:

”Dalam bahasa akademi, perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor: kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Kegiatan-kegiatan basis (*basic activity*) adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang-barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan bukan basis (*non-basic activity*) adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang jadi, luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama adalah bersifat lokal.”

Menentukan suatu kegiatan yang merupakan kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat dilakukan dengan metode-metode baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode pengukuran langsung dapat dengan survey langsung untuk mengidentifikasi sektor mana yang merupakan sektor basis. ”Metode yang paling langsung, tetapi paling mahal dan paling makan waktu adalah mengukur basis yang bersangkutan secara langsung dengan menggunakan *survey standard*

dan metode paertanyaan (*questionnaires*).” (Richardson, 2001).

Pembangunan Ekonomi Lokal dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Menurut Blakely dan Bradshaw, (2002) Pembangunan ekonomi lokal merujuk pada sebuah proses di mana pemerintah lokal dan swasta (organisasi yang ada di masyarakat) bekerjasama untuk mendorong berkembangnya aktifitas-aktifitas usaha sehingga terbuka kesempatan kerja lokal, khususnya bagi masyarakat yang kurang beruntung/miskin dan menganggur. Istilah lokal merujuk pada sebuah area geografis dari sebuah otoritas pemerintah lokal dengan penduduknya yang secara bersama-sama menggunakan sumberdaya yang ada dalam aktifitas kehidupan mereka. Otoritas pemerintahan yang dimaksud dapat berupa kecamatan, kota, atau desa. Tujuan utama pembangunan ekonomi lokal adalah menstimulasi terbukanya kesempatan-kesempatan kerja lokal/di daerah di sektor-sektor yang memanfaatkan sumberdaya manusia, alam, dan kelembagaan lokal.

United Nations Habitat dan Ecoplan International Inc. (2005) yang mensosialisasikan perencanaan hingga implementasi pembangunan ekonomi lokal di berbagai wilayah di dunia memberikan definisi yang serupa. Dikatakan bahwa pembangunan ekonomi lokal adalah salah satu pendekatan atau strategi pembangunan daerah yang mengedepankan kerjasama/ kemitraan dan *power sharing* antara pemerintah (lokal maupun nasional), swasta dan organisasi masyarakat (lokal, nasional maupun internasional), serta masyarakat setempat dalam proses pembangunan. PEL memiliki tujuan utama mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Selain itu, pembangunan ekonomi lokal dicirikan juga oleh upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal untuk pembangunan wilayah.

Blakely dan Bradshaw (2002) menyatakan bahwa ada dua pendekatan dalam melakukan memuat kebijakan pembangunan ekonomi lokal, yaitu (1) pendekatan berpusat pada perusahaan (pihak swasta) dan (2) pendekatan yang lebih berpusat pada masyarakat. Pada pendekatan pertama, setiap aktifitas ekonomi dipimpin/diputuskan oleh perusahaan, sektor publik bertanggung jawab menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya investasi swasta/perusahaan sehingga umumnya sumberdaya publik disediakan untuk kepentingan perusahaan/swasta. Pendekatan kedua, menekankan bahwa keputusan ekonomi dipengaruhi oleh kebutuhan sektor publik yang bertanggung jawab mengarahkan investasi swasta bermanfaat besar bagi masyarakat luas. Pemanfaat pembangunan difokuskan pada kelompok berpenghasilan rendah dan minoritas, sehingga keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan adalah keharusan. Target pembangunan diletakkan pada sektor yang unggul secara ekonomi dan yang memenuhi kebutuhan penting masyarakat. Karenanya, kegiatan pembangunan umumnya bersifat desentralisasi dan menekankan pada kebutuhan tenaga kerja, termasuk pengangguran, pekerja kasar dan tidak terampil.

Indahsari (2010) menyatakan empat tahapan inti dalam proses perencanaan. Pertama, menganalisis kondisi saat ini (*existing condition*) sehingga dapat dirumuskan potensi sekaligus permasalahan yang sedang dihadapi untuk diperbaiki. Kedua, menentukan kondisi ideal yang diharapkan (*expected condition*). Ketiga, menentukan strategi bagaimana mendekati/menghilangkan

jarak atau kesenjangan antara kondisi yang ada saat ini dengan yang diharapkan, dengan mempertimbangkan segala kemampuan (kekuatan dan peluang) serta keterbatasan (kelemahan dan ancaman) yang ada. Strategi perlu dijabarkan ke bentuk yang lebih operasional, yaitu dalam bentuk program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Keempat, menentukan indikator yang mampu mengukur keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan rencana dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil. Hasil evaluasi, salah satunya dari pencapaian nilai indikator yang telah ditetapkan, selanjutnya menjadi masukan dalam analisis kondisi saat ini dalam perencanaan di masa yang akan datang.

Blakely dan Bradshaw (2002) menyatakan ada 6 fase dan tugas yang harus dilakukan dalam proses perencanaan. Fase pertama yaitu mengumpulkan dan menganalisa data untuk mengetahui struktur ketenagakerjaan, kebutuhan tenaga kerja, menganalisis peluang dan hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal serta kapasitas institusi. Fase kedua adalah memilih strategi pembangunan yang dimulai dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai/diharapkan dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Fase ketiga adalah memilih program pembangunan dari berbagai proyek yang mungkin yang telah diidentifikasi serta layak dilaksanakan. Fase keempat adalah membuat perencanaan anggaran yang dibutuhkan. Fase kelima yaitu menspesifikasikan rincian proyek melalui perencanaan usaha, studi kelayakan, dan program pelaksanaan serta monitoring/evaluasi program. Fase keenam yaitu finalisasi rencana serta impelentasinya. Dalam fase ini ditentukan jadwal pelaksanaan serta target-target indikator yang ingin dicapai.

Dalam pembangunan ekonomi lokal mensyaratkan pentingnya keterlibatan/partisipasi pihak yang terlibat dalam pembangunan, khususnya masyarakat, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan lokal, perencanaan partisipatiflah yang seharusnya diterapkan. Hal ini bisa dipahami karena rasional dan informasi setiap orang terbatas, sehingga perencanaan yang harus komprehensif hanya dapat dipenuhi dengan membangun partisipasi seluruh pihak terkait agar di dapat informasi yang lengkap dan dipahami bersama untuk kemudian dibangun keputusan yang terbaik. Serupa dengan proses perencanaan, tahap perencanaan partisipatif dimulai dari pengumpulan data, pemetaan potensi sosial/ekonomi, analisis masalah, penetapan tujuan, identifikasi alternatif-alternatif, hambatan dan peluang, hingga memilih alternatif yang terbaik.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Surat edaran menteri dalam negeri nomor: 050/200/ii/bangda/2008 direktorat jenderal bina pembangunan daerah departemen dalam negeri 2008 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Selain itu partisipasi masyarakat juga masih dimungkinkan untuk diberikan ruang oleh pemerintah melalui proses jaring aspirasi dan sosialisasi.

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perekonomian Wilayah

Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) merupakan salah satu motor penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Di negara-negara berkembang dengan tingkat pendapatan menengah dan rendah, peranan UMKM sangatlah penting. Contohnya di beberapa negara kawasan Afrika, perkembangan dan pertumbuhan UMKM sekarang diakui sangat penting untuk menaikkan *output aggregate* dan kesempatan kerja (Tambunan, 2002).

Di Indonesia hal itu bisa dilihat dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak di semua sektor ekonomi dan kontribusinya yang besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan, khususnya di daerah pedesaan dan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Sulistyastuti, (2004) menegaskan peran UMKM di Indonesia yaitu (1) UMKM sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, (2) Penyedia kesempatan kerja, (3) Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat, (4) Pencipta pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitasnya serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan, dan (5) memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas.

Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendataan tahun 2012-2013 diketahui bahwa sektor UMKM di Indonesia menguasai 99,99% dari jumlah unit usaha yang ada sedangkan usaha besar hanya menguasai 0,01%. Tenaga kerja di sektor UMKM tahun 2011 pangsanya sebesar 97,24%, tahun 2012 sebesar 97,16% sedangkan tenaga kerja di sektor usaha besar tahun 2011 pangsanya sebanyak 2,76% dan tahun 2012 sebanyak 2,84%. Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UMKM tahun 2012 bagiannya sebesar 57,6% dan tahun 2012 sebesar 57,48%, sedangkan PDB dari sektor usaha besar tahun 2011 bagiannya sebesar 42,4% dan tahun 2012 sebesar 42,52%.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM, maka sektor UMKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM telah terbukti tangguh menghadapi krisis ekonomi yang terjadi 1998, dimana hanya sektor UMKM lah yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu *survive* karena, pertama, tidak memiliki utang luar negeri, kedua tidak banyak utang di perbankan karena modal tidak terlalu besar, dan ketiga menggunakan input lokal dan yang terakhir berorientasi ekspor (Kuncoro: 2008).

Triamita (2012) menyatakan bahwa Sekitar 60% konsentrasi UMKM ada di Pulau Jawa. Pulau Sumatera yang memiliki luas dan sumber daya alam melimpah hanya terdapat sekitar 15% dari total UMKM di Indonesia. Begitu juga Pulau Kalimantan dan Sulawesi yang masing-masing hanya dibawah 10%. Konsentrasi UMKM secara spasial tersebut tentu saja tidak menguntungkan dalam konstelasi pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pemerataan. Kesenjangan UMKM antar provinsi juga akan melemahkan proses industrialisasi, dimana Indonesia memiliki struktur industri yang masih didominasi oleh keberadaan UMKM. Oleh sebab itu, pengembangan UKM sangat diperlukan bagi pembangunan regional terutama setelah otonomi daerah diberlakukan, mengingat keunggulan-keunggulan yang dimiliki UMKM.

Amstrong dan Taylor (2000) menyebutkan lima argumen yang relevan mengenai peran UKM dalam pembangunan ekonomi regional: (1) UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, (2) UMKM memiliki kemampuan

memunculkan industri-indusri kecil baru lainnya yang bersifat fleksibel dan bervariasi serta memunculkan enterpreneur baru yang berani menanggung risiko, (3) UMKM memiliki kemampuan mendorong terjadinya persaingan secara intensif antar UMKM bahkan usaha besar serupa. Hal ini sangat penting untuk mendorong lingkungan usaha yang kondusif dan berbudaya usaha yang kuat, (4) UMKM mendorong inovasi, dan (5) UMKM mampu meningkatkan hubungan industrial (misal hubungan industri dengan buruh) dan menyediakan lingkungan kerja yang baik dengan para buruhnya.

Hayter (2000) menambahkan bahwa UMKM meningkatkan efek multiplier dan menciptakan keterkaitan. UMKM yang membeli bahan baku serta memanfaatkan jasa-jasa dari pasar lokal secara langsung membutuhkan adanya supplier. Realita tersebut mendukung hipotesa seed-bed yang mengatakan ahwa keberadaan UMKM menimbulkan kemunculan usaha-usaha terkait. Lebih lanjut, Hayter (2000) menjelaskan adanya dampak positif yang berlanjut dari keberadaan UMKM dalam pembangunan daerah. Kontribusinya terhadap pembangunan lokal/daerah adalah kemampuannya menggali potensi daerah sekaligus menentukan pola pembangunan ekonominya.

Kelapa Sebagai Komoditas Perkebunan yang Sangat Potensial

Anggoro (2009) menyatakan bahwa tanaman kelapa memiliki berbagai hasil yang sangat bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Seperti jok mobil, nata de coco, arang briket, anyaman dan sebagainya. Tanaman kelapa merupakan komoditas perkebunan yang sangat potensial, semua bagian tanaman kelapa bermanfaat bagi kebutuhan hidup manusia. Sehingga disebut sebagai pohon kehidupan.

Buah kelapa terdiri dari sabut, tempurung, daging buah, dan air kelapa; semua bagian tersebut tidak ada yang terbuang dan dapat dibuat untuk menghasilkan produk industri. Sabut kelapa antara lain dapat dimanfaatkan sebagai coir fibre, keset, sapu, jok mobil, dan matras. Daging buah dapat dipakai sebagai bahan baku untuk menghasilkan kopra, minyak kelapa, *coconut cream*, santan, dan kelapa parutan kering (*desiccated coconut*). sedangkan air kelapa dapat dipakai untuk membuat cuka, penggumpal lateks. dan nata de coco. Tempurung dapat dimanfaatkan untuk membuat charcoal, carbon aktif, arang briket, dan kerajinan tangan. Dari batang kelapa dapat dihasilkan bahan-bahan bangunan baik untuk kerangka bangunan maupun untuk dinding serta atap, dan peralatan rumah tangga (pot, mebel, dan lain-lain). Daun kelapa dapat diambil lidinya yang dapat dipakai sebagai sapu, serta barang-barang anyaman. Berikut ini akan dibahas tentang pemanfaatan hasil samping kelapa yang telah banyak dilakukan (Anggoro, 2009).

Sabut Kelapa Menurut *United Coconut Association of the Philippines* (UCAP) dalam Anggoro (2009), dari satu buah kelapa dapat diperoleh rata-rata 0,4 kg sabut yang mengandung 30% serat. Serat dapat diperoleh dari sabut kelapa dengan cara perendaman dan mekanis. Sabut kelapa sangat kaya dengan unsur Kalium yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oleh karena itu apabila sabut kelapa tidak dipergunakan untuk produk-produk yang laku dijual, maka dapat dikembalikan ke kebun sebagai pupuk Kalium.

Peran Tehnologi dalam Pembangunan Konsepsi Teknologi Tepat Guna

Teknologi Tepat Guna (TTG) lahir sebagai jawaban (respons positif) para ilmuwan, peneliti, pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan, dan tantangan hidup masyarakat. Tujuan Teknologi Tepat Guna menerapkan konsep-konsep manajemen modern ke dalam praktek (dunia nyata dan perilaku masyarakat) dalam upaya optimalisasi hasil produksi/pendapatannya (Muhi, 2009).

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup (Inpres No. 3 Tahun 2001). Penerapan Teknologi Tepat Guna adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk mempercepat alih teknologi dari pencipta atau pemilik kepada pengguna teknologi. Pengertian teknologi tepat guna pada inpres No. 3 tahun 2001 dikuatkan dengan pernyataan Tilaar (2007) dalam Munaf *et al.*, (2008) menyatakan teknologi tepat guna adalah yang teknologi cocok dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan pada saat rentang waktu tertentu. Biasanya dipakai sebagai istilah untuk teknologi yang terkait dengan budaya lokal. Teknologi tepat guna sebagai salah satu jalur penting untuk mencapai tujuan yang mendasar, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Situmorang dan Safri (2011) mendefinisikan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa dimanfaatkan pada saat rentang waktu tertentu. Tujuan dari penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam Inpres No.3 Tahun 2001 yaitu: (1) Mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, meningkatkan produktivitas dan mutu produksi. (2) Menunjang pengembangan wilayah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal, regional, dan global. (3) Mendorong tumbuhnya inovasi di bidang teknologi.

Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 4 Tahun 2001 dalam Situmorang dan Safri (2011), disebutkan bahwa TTG dimanfaatkan untuk: (1) Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan TTG untuk peningkatan kapasitas dan mutu produksi. (2) Meningkatkan pelayanan informasi dan membantu masyarakat untuk mendapatkan TTG yang dibutuhkan. (3) Meningkatkan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi masyarakat. (4) Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.

Teknologi tepat guna merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Teknologi tersebut harus berpotensi memenuhi beberapa kriteria antara lain (Muhi, 2009): (a) mengkonversi sumberdaya alam, (b) menyerap tenaga kerja, (c) memacu industri rumah tangga, dan (d) meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pola Pendekatan Pembangunan Teknologi Tepat Guna

Tujuan pengembangan suatu teknologi pada dasarnya adalah untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan, baik yang telah nyata, ataupun yang dirasakan dan diinginkan adanya, dan bahkan yang diantisipasi akan diinginkan, maka suatu

upaya pengembangan teknologi yang efektif, pertama-tama harus didasarkan pada permintaan pasar, baik yang telah nyata ada, atau yang mulai tampak dirasakan adanya. Prasyarat tersebut memang perlu, tetapi belum cukup. Kemampuan itu harus dilengkapi dengan kemampuan menerjemahkan perkembangan kebutuhan pasar tersebut dengan kemampuan untuk menggagas spektrum teknologi bagaimana yang dapat menanggapi kebutuhan yang diamati tersebut (Munaf *et al.*, 2008).

Pola pendekatan yang dikemukakan di atas mensyaratkan adanya institusi, baik yang berdiri sendiri maupun terorganisasi di dalam sistem-sistem korporat atau masyarakat. Sistem-sistem semacam itu jelas perlu mempunyai sumberdaya pikir yang canggih, yang mampu memadukan kebutuhan, potensi khazanah ilmu pengetahuan, penerjemahan khazanah tersebut menjadi paket-paket teknologi, evaluasi dari teknologi yang berhasil dikemas tersebut untuk menguji keterlaksanaannya, baik dari pertimbangan teknis, ekonomi, sosial, maupun persyaratan lingkungan. Selain itu, mampu berkomunikasi kepada masyarakat ilmiah maupun masyarakat luas, pemerintahan dan lembaga-lembaga masyarakat untuk memotivasi mereka untuk mendukung ataupun meyakinkan kemanfaatan dari apa yang akan dilakukan, sedang dilakukan, dan yang sudah dihasilkan. Namun tingkat keberhasilannya masih ditentukan oleh ketepatan-gunaan teknologi yang dihasilkan. Tingkat keberhasilan akan lebih tinggi bila unsur ketepatan-gunaan dan ketepatan saatan dipenuhi (Munaf *et al.*, 2008).

Konsep Inkubator Bisnis

Inkubator bisnis dapat dikatakan sebagai suatu tempat yang menyediakan fasilitas bagi percepatan penumbuhan wirausaha melalui sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan kemampuan utama usahanya. Pemerintah Republik Indonesia pun menyadari pentingnya penyelenggaraan inkubator wirausaha tersebut. Dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif dan menumbuhkembangkan wirausaha inovatif, telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Riset dan Teknologi pada tanggal 31 Maret 2010. Ruang lingkup dari isi kesepakatan bersama ini meliputi peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas inkubator bisnis dan teknologi. Kesepakatan juga ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan ruang gerak yang luas bagi berkembangnya inkubator bisnis dan *tenant*-nya, serta meningkatkan koordinasi dan dukungan instansi terkait.

Lebih jauh lagi, untuk mendorong perkembangan inubator wirausaha, pemerintah telah membuat kebijakan pemerintah berupa Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan tentang perlunya wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha yang mampu menghasilkan atau menumbuhkembangkan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional. Wirausaha baru yang memiliki karakteristik tersebut dipercaya dapat meningkatkan daya saing nasional, sementara itu wahana yang dimaksud adalah inkubator wirausaha.

Dalam Perpres tersebut dikatakan bahwa inkubator wirausaha merupakan suatu lembaga inovasi berbasis teknologi yang berfungsi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah melalui proses inkubasi terhadap Peserta

Inkubasi (Tenant). Dalam Perpres juga dijelaskan bahwa Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi, yaitu wirausahawan atau calon wirausahawan yang dinilai layak mengikuti proses inkubasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Kajian terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pengolah sabut kelapa melalui incubator bisnis dan teknologi tepat guna dilakukan di Kabupaten Sumenep. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan penelusuran studi pustaka dan pengamatan langsung di lapangan. Analisis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan sifat yang terjadi saat riset dilakukan. Hal ini mencakup profil dan potensi UMKM pengolah sabut kelapa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini terkait dengan informasi teknologi yang digunakan sekarang, permasalahan yang terjadi pada pemanfaatan teknologi, serta kebutuhan teknologi tepat guna. Sedangkan data sekunder yang diperlukan dalam kajian ini adalah data yang berkaitan dengan informasi struktur perekonomian Kabupaten Sumenep, luas areal dan produksi tanaman perkebunan rakyat, jumlah total produksi kelapa, mata pencaharian penduduk, banyaknya industri kecil, dan lain-lain yang diperoleh dari instansi yang terkait maupun dari pustaka yang relevan.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yaitu:

1. Menekankan partisipasi

Penekanan partisipasi dilakukan oleh peneliti/surveyor dalam pelaksanaan riset. Hal ini dilakukan dengan menyertakan pelibatan langsung obyek penelitian. Sehingga data yang didapatkan nantinya diharapkan dapat menjadi representasi aspirasi masyarakat kecil Kabupaten Sumenep. Selain itu penyebaran kuisioner dilakukan dengan menggunakan teknik delphi.

2. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukandalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti melakukan observasi yang terfokus. Salah satu peranan pokok dalam melakukan observasi ialah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang alami

3. Wawancara (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan *face to face* dengan responden, alat bantu pelaksanaan wawancara ialah panduan. Wawancara dimulai dengan mengemukakan

topik yang umum untuk membantu surveyor memahami perspektif makna yang diwawancarai. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar penelitian kualitatif, bahwa jawaban yang diberikan harus dapat membeberkan perspektif yang diteliti bukan sebaliknya, yaitu perspektif dari peneliti sendiri.

4. Kajian Dokumen

Kajian dokumen yang dilakukan merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, profil desa pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Peneliti dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti. Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisa isi. Cara menganalisa isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah komoditi kelapa di Kabupaten Sumenep yang tersebar merata di seluruh kecamatan baik kecamatan wilayah daratan maupun kecamatan yang ada di wilayah kepulauan. Teknik pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan nilai indeks *location quotient* (LQ), jika nilai indeks LQ lebih besar dari 1 maka komoditi kelapa pada kecamatan tersebut disebut sector basis dan perannya sangat besar atau dapat pula diartikan bahwa komoditi tersebut mendominasi dari keseluruhan komoditi pada sub sector perkebunan. Oleh karena itu analisis sector basis ini bertujuan untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas guna melihat potensi sabut kelapa yang ada di kabupaten Sumenep.

Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan penelitian yaitu:

1. **Metode *Importance Performance Analisis* (IPA)** pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977) dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa yang dikenal pula sebagai *quadrant analysis* (Brandt, 2000 dan Latu & Everett, 2000). Metode ini telah diterima secara umum dan dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisa yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003). Metode IPA ini digunakan untuk mencapai tujuan pertama dan kedua dalam penelitian ini yaitu menentukan tingkat permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat pengolah sabut kelapa dan merumuskan rencana dan strategi penanganan yang harus dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat pengolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep.
2. **Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA)**, metode ini digunakan untuk mencapai tujuan ke tiga dan ke empat dalam penelitian ini. Metode PRA digunakan untuk mengetahui Tehnologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat sekitar. Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam

keseluruhan kegiatan. Metoda PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Kritik PRA terhadap pembangunan adalah bahwa program-program pembangunan selalu diturunkan "dari atas" (*top down*) dan masyarakat tinggal melaksanakan. Proses perencanaan program tidak melalui suatu 'penjajagan kebutuhan' (*need assesment*) masyarakat, tetapi seringkali dilaksanakan hanya berdasarkan asumsi, survei, studi atau penelitian formal yang dilakukan oleh petugas atau lembaga ahli-ahli penelitian. Akibatnya program tersebut sering tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak adanya rasa memiliki terhadap program itu. Dengan PRA, yakni dengan partisipasi masyarakat keadaan itu diperbaiki dan juga keterampilan-keterampilan analitis dan perencanaan dapat dialihkan kepada masyarakat. Dengan demikian secara bertahap ketergantungan pada pihak luar akan berkurang dan pengambilan prakarsa dan perumusan program bisa berasal dari aspirasi masyarakat (*bottom up*).

Menurut Robert Chambers (1987) PRA lebih cocok disebut sebagai metoda dan pendekatan-pendekatan jamak dari pada metoda dan pendekatan tunggal, dan PRA adalah menu yang menyajikan daftar metoda dan teknik terbuka dan beragam. Dengan penekanannya pada partisipasi, maka metoda PRA mempunyai prinsip-prinsip: belajar dari masyarakat, orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku, saling belajar dan saling berbagi pengalaman, keterlibatan semua kelompok masyarakat, bebas dan informal, menghargai perbedaan dan triangulasi.

Metoda PRA dibangun berdasarkan (a) kemampuan- kemampuan masyarakat desa setempat, (b) penggunaan teknik-teknik fasilitatif dan partisipatoris, dan (c) pemberdayaan masyarakat desa setempat dalam prosesnya (Khan and Suryanata, 1994). Metoda PRA pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi 4 (empat) macam proses, yaitu: (1) appraisal dan perencanaan secara partisipatoris, (2) pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program secara partisipatoris, (3) penyelidikan berbagai topik (seperti; manajemen sumber daya alam, keamanan pangan, kesehatan, dan lain-lain), dan (4) pelatihan dan orientasi untuk peneliti dan masyarakat desa.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan lapangan melalui tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui kolekting data sekunder dari berbagai instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Aparatur Daerah Setingkat Desa diperoleh informasi sebagai berikut:

Kontribusi Komoditi Kelapa terhadap Sub-Sektor Perkebunan

Komoditi kelapa di Kabupaten Sumenep tersebar merata ke seluruh kecamatan baik kecamatan wilayah daratan maupun kecamatan yang ada di wilayah kepulauan. Kontribusi terbesar dari komoditi ini terhadap sub sector perkebunan disumbangkan oleh wilayah kepulauan, dan bahkan dari 9 (Sembilan) kecamatan yang ada di kepulauan hanya Kecamatan Talango yang kontribusinya

di bawah 50% yaitu 48,58%, sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya kontribusinya mencapai 80% lebih, bahkan Kecamatan Raas kontribusinya mencapai 97,76%. Sedangkan untuk wilayah daratan kontribusi terbesar disumbangkan oleh Kecamatan Dungkek sebesar 83,57%, sedangkan kontribusi terendah terdapat di Kecamatan Lenteng sebesar 9,47%. Hal ini dapat diartikan bahwa bahwa 9 daerah tersebut merupakan daerah ekonomi basis dari penghasil kelapa dan sabut kelapa.

Peran Komoditi Kelapa pada Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Sumenep

Peran komoditi kelapa pada sub sector perkebunan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep bisa dilihat dari nilai *indeks location quotient* (LQ), jika nilai indeks LQ lebih besar dari 1 maka komoditi kelapa pada kecamatan tersebut disebut sector basis dan perannya sangat besar atau dapat pula diartikan bahwa komoditi tersebut mendominasi dari keseluruhan komoditi pada sub sector perkebunan. Keberadaan komoditi ini melebihi kebutuhan masyarakat yang ada disekitar daerah tersebut sehingga kelebihannya bisa dikirim atau dijual ke luar wilayah.

Melimpahnya komoditi kelapa pastinya akan diikuti pula dengan melimpahnya produk turunan dari komoditi ini seperti batok kelapa, air kelapa dan yang paling banyak dan sampai saat ini minim pemanfaatannya adalah sabut kelapa. Oleh karena itu analisis sector basis ini bertujuan untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas guna melihat potensi sabut kelapa yang ada di kabupaten Sumenep.

Adapun wilayah prioritas yang terpilih untuk dijadikan obyek penelitian Pemberdayaan UMKM Pengolah Sabut Kelapa melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi tepat guna di Kabupaten Sumenep adalah Gili Genting, Raas, Kangayan, dan Arjasa untuk Wilayah Kecamatan Kepulauan, Saronggi, Rubaru, Lenteng, Batu Putih untuk wilayah Kecamatan Daratan Kabupaten Sumenep. Adapun hasil perhitungan *location quotient* dapat dijabarkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Location Quotion untuk Komoditi Kelapa

Kecamatan	Komoditi Kelapa (Ton)	Indeks LQ
Pragaan	1339.84	0.89
Bluto	1638.38	0.58
Saronggi	730.08	0.82
Giligenting	1050.82	1.47
Talango	152.16	0.82
Kalianget	144.56	0.70
Kota Sumenep	226.14	0.72
Batuan	569.45	1.21
Lenteng	284.59	0.16
Ganding	2054.03	0.73
Guluk-guluk	1755.02	0.75
Pasongsongan	1809.05	0.72
Ambunten	1363.84	1.14
Rubaru	1294.17	0.86
Dasuk	1089.12	0.80

Kecamatan	Komoditi Kelapa (Ton)	Indeks LQ
Manding	1337.02	0.98
Batu Putih	1047.12	0.94
Gapura	856.10	1.01
Batang-Batang	2023.29	1.10
Dungkek	2638.72	1.39
Nonggunong	2312.01	1.46
Gayam	663.35	0.97
Raas	2467.27	1.63
Sapeken	2416.27	1.59
Arjasa	1792.10	1.51
Kangayan	898.22	1.50
Masalembu	2382.21	1.55

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2013 diolah

Analisis permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat pengolah sabut kelapa (*performance*) dan tingkat kepentingan/penanganan yang harus dilaksanakan

Berdasarkan tehnik delphi dalam perumusan isi kuisioner dimana masyarakat dan aparatur dilibatkan secara parsitipatif dalam penentuan isi kuisioner, kemudian kuisioner disebar secara langsung untuk mendapat respon jawaban maka disimpulkan sembilan permasalahan yang akan diolah dalam tehnik *Importance Performance Analisis (IPA)*, diantaranya:

1. Peningkatan skill UMKM Pengolah Sabut Kelapa
Masyarakat Pengolah sabut kelapa dan aparatur pemerintah merasa perlu adanya pelatihan keterampilan yang berkesinambungan agar produk olahan mereka lebih variatif dan respon terhadap kebutuhan pasar atau dengan kata lain mengikuti perkembangan jaman (*Modern*)
2. Kemitraan dengan pihak lain
Masyarakat pengolah sabut kelapa dan aparatur pemerintah meyakini bahwa dengan kemitraan dengan pihak lain akan menjamin kontinuitas kegiatan produksi, misalnya: bermitra dengan pengusaha meubel dalam menyediakan busa untuk kursi tamu, bermitra dengan pengusaha kerajinan hiasan dinding dalam penyediaan serabut, dan bermitra kontraktor kontruksi bangunan dalam penyediaan bahan campuran dinding yang tahan dan kedap suara.
3. Penguatan kelembagaan UMKM pengolah Sabut Kelapa
Pada prinsipnya dengan melihat realitas UMKM saat ini masih belum berdaya maka diperlukan adanya kerjasama antar berbagai pihak. Secara individu, pengelola UMKM pengolah sabut kelapa tidak akan mampu mengembangkan dirinya tanpa ada dukungan dari pihak lain karena lemahnya kekuatan pasar (input maupun output) yang dimiliki serta keterbatasan proses produksi yang dijalankan. Tetapi secara kolektif dan melalui manajemen kelembagaan yang profesional, kekuatan UMKM di pasar input dan output, serta kredibilitas/daya saing UMKM dengan pihak eksternal akan meningkat. Bagaimanapun, telah banyak terbukti bahwa produktivitas sekelompok individu yang berusaha secara kolektif akan lebih tinggi dari penjumlahan produktivitas individu-individu yang berusaha secara parsial.

4. Penguatan Akses Terhadap Tehnologi Tepat Guna
Tehnologi tepat guna yang dimaksud adalah teknologi yang benar-benar dapat memecahkan masalah yang ada tanpa menimbulkan masalah lain yang mungkin tambah rumit. Alasan-alasan yang mendukung diterapkan teknologi tepat guna pada masuarakat pengolah sabut kelapa di kabupaten Sumenep adalah :(1) Teknologi tepat (sederhana) lebih mudah dipahami, atau dipraktekkan oleh masyarakat yang masih berada dalam tingkat kebudayaan teknologi yang rendah, (2) Peralatannya lebih murah dan memberikan kemungkinan skala produksi lebih meningkat, dan (3) Teknologi menengah yang bersifat padat karya membuka kesempatan kerja yang lebih luas.
5. Formalitas UMKM non Formal
Meski tidak sedikit ketersediaan bantuan bagi pengembangan UMKM, tidak semua UMKM pengolah sabut kelapa dapat akses pada bantuan tersebut dan/atau belum bisa memanfaatkan bantuan yang ada dengan berbagai alasan. Pertama, mereka tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Syarat formalitas UMKM – seperti domisili yang tetap, adanya SIUP atau TDP, hingga administrasi transaksi usaha yang rapi – tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar UMKM pengolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep
6. Pendampingan yang intensif (*Incubator Bussines*)
Pendampingan secara intensif oleh praktisi usaha dalam jangka waktu tertentu mulai dari perencanaan usaha bagi masyarakat yang ingin memulai usaha, tehnik prosuksi dan pemasaran. Pemerintah daerah menyediakan tempat khusus yang bersifat permanen kemudian menggandeng praktisi usaha pengolahan sabut kelapa yg telah sukses dalam usahanya, selanjutnya meminta perguruan tinggi untuk mengamati perkembangan program tersebut secara periodik untuk melihat capaian kinerja yang telah dihasilkan dari program tersebut
7. Penguatan Akses ke Lembaga Permodalan
Kendala utama yang terus menjadi hambatan dalam pengembangan UMKM pengolah sabut kelapa adalah permodalan. Terbatasnya akses permodalan disebabkan alasan administrasi atau manajemen usaha yang mengabaikan administrasi pembukuan dalam kegiatan operasional UMKM yang menyebabkan bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan perbankan maupun non bank akhirnya tidak bisa terakses.
8. penyediaan sarana-prasarana UMKM, mulai dari input, proses, hingga ke output dan pemasarannya
Bentuk utama fasilitasi pemerintah dalam penyediaan sarana-prasarana UMKM pengolah sabut kelapa adalah fasilitasi kerjasama/kemitraan UMKM dengan lembaga terkait. Bentuk-bentuk kemitraan yang dapat dilakukan adalah inti-plasma, sub kontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dll. Sementara itu, kerjasama/kemitraan dapat dilakukan pada penyediaan bahan baku, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemasaran.
9. Penguatan koordinasi dan Sinergisitas berbagai upaya pengembangan UMKM Pengolah Sabut Kelapa oleh pihak-pihak terkait
Membuat program pengembangan UMKM pengolah sabut kelapa lintas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Bagaimanapun, untuk pengembangan UMKM yang efektif dan efisien, ego sektoral harus

dikesampingkan. Agar terjadi sinergisitas dalam pengembangan UMKM di antara SKPD-SKPD terkait, maka perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi berbagai program/kegiatan pengembangan UMKM pengolah sabut kelapa harus terpadu. Sekali lagi, untuk menjamin hal ini, maka perlu SKPD yang menjadi koordinator dan perencana, serta SKPD penanggung jawab teknis.

Sembilan permasalahan yang butuh penyelesaian dengan segera tersebut diungkapkan oleh masyarakat pengolah sabut kelapa dan dirasakan pula oleh aparat pemerintah Kabupaten Sumenep untuk segera dilakukan penanganan berdasarkan skala prioritas berdasarkan kekuatan anggaran yang dimilikinya. Oleh karena itu semua permasalahan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kuisisioner dan disebar kepada masyarakat pengolah sabut kelapa dan aparat pemerintah Kabupaten Sumenep untuk diberikan skor guna menentukan skala prioritas seperti yang dimaksud pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Rata-rata Tingkat Kebutuhan Dan Prioritas Penanganan Untuk Berbagai Faktor

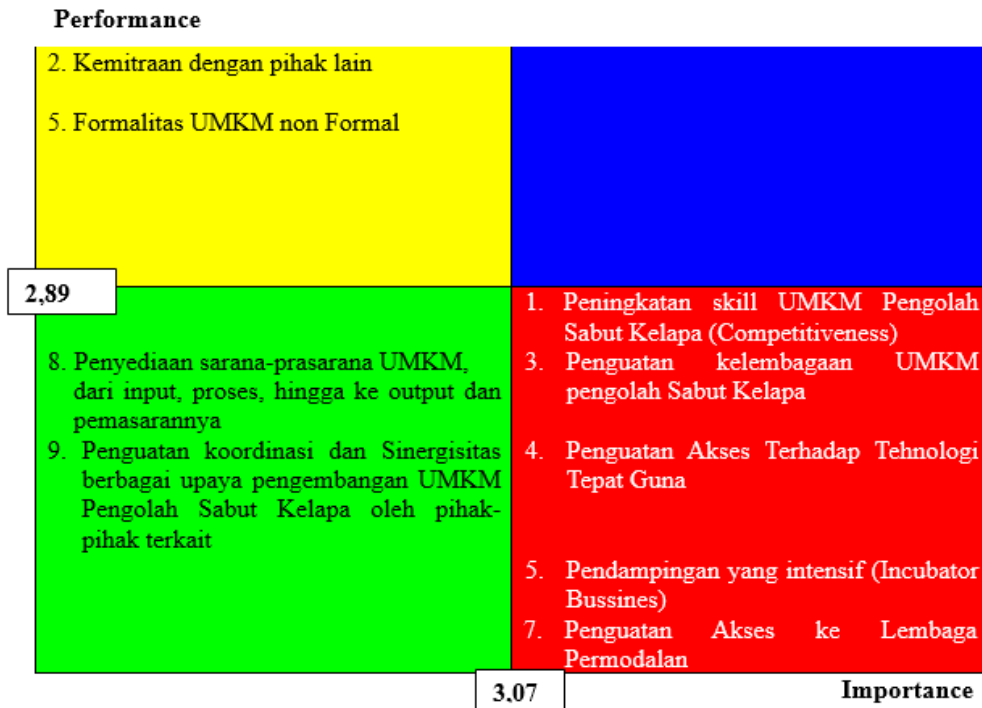
Kode	Faktor	Rata-rata	
		<i>Performance</i>	<i>Important</i>
1	Peningkatan skill UMKM Pengolah Sabut Kelapa (Competitiveness)	3,08	3,16
2	Kemitraan dengan pihak lain	2,94	2,60
3	Penguatan kelembagaan UMKM pengolah Sabut Kelapa	3,04	3,20
4	Penguatan Akses Terhadap Tehnologi Tepat Guna	3,06	3,08
5	Formalitas UMKM non Formal	2,96	3,04
6	Pendampingan yang intensif (Incubator Bussines)	3,08	3,19
7	Penguatan Akses ke Lembaga Permodalan	3,06	3,43
8	Penyediaan sarana-prasarana UMKM, mulai dari input, proses, hingga ke output dan pemasarannya	2,18	2,94
9	Penguatan koordinasi dan Sinergisitas berbagai upaya pengembangan UMKM Pengolah Sabut Kelapa oleh pihak-pihak terkait	2,64	3,02
10	Rata-rata Keseluruhan	2,89	3,07

Sumber: Data Primer diolah

Pembahasan Tingkat Kebutuhan dan Prioritas Penanganan

IPA pada penelitian ini menggabungkan pengukuran tingkat kebutuhan masyarakat pengolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep dan prioritas

penanganan yang harus diambil oleh aparat pemerintah Kabupaten Sumenep dalam grafik dua dimensi yang memudahkan penjelasan data dan mendapatkan usulan praktis. Interpretasi grafik IPA sangat mudah, dimana grafik IPA dibagi menjadi empat buah kuadran berdasarkan hasil pengukuran *importance - performance* sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Performance dan Importance

Berikut penjelasan untuk masing-masing kuadran dalam penelitian ini:

- Kuadran Pertama ditandai dengan warna hijau, dimana performnya masih rendah dan masyarakat pengolah sabut kelapa menganggap tidak terlalu penting, seperti Penyediaan sarana-prasarana UMKM dari input proses hingga ke output dan pemasarannya
- Kuadran Kedua ditandai dengan warna kuning muda, dimana performnya sudah cukup tinggi dan masyarakat menganggap tidak terlalu penting dilakukan penanganan segera, yaitu: (1) kemitraan dengan pihak lain, dan (2) formalitas UMKM non formal.
- Kuadran Ketiga ditandai dengan warna biru tua, tingkat performnya tinggi dan kepentingannya juga tinggi. Pada kuadran ini tidak ada variabel yang yang dipilih oleh responden baik dari masyarakat pengolah sabut kelapa maupun aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumenep.
- Kuadran Keempat ditandai dengan warna merah, performnya rendah dan masyarakat maupun pemerintah daerah menganggap ini penting sekali sehingga butuh penanganan dengan segera, yaitu: (1) peningkatan skill UMKM pengolah sabut kelapa, (2) penguatan kelembagaan UMKM pengolah sabut kelapa, (3) penguatan akses terhadap teknologi tepat guna, (4) pendampingan yang intensif (inkubator), dan (5) penguatan akses ke lembaga permodalan.

Pembahasan Pemberdayaan UMKM Pengolah Sabut Kelapa Melalui Inkubator Bisnis

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, menyatakan bahwa dari sisi jumlah pelaku, dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Karakteristik umum dari kelompok pengusaha tersebut adalah adanya berbagai hambatan dan kendala usaha, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Walaupun demikian, UMKM terbukti mampu bertahan selama krisis ekonomi melanda Indonesia, sementara usaha besar banyak yang terguncang dan bangkrut. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Karenanya, UMKM menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

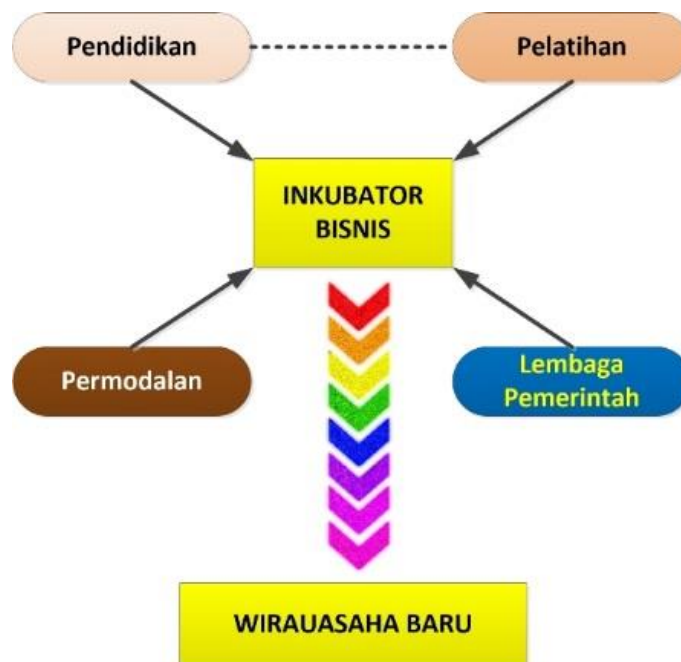
Mengingat peran penting UMKM tersebut di atas serta wujud keberpihakan kepada kelompok usaha ekonomi (sebagian besar) rakyat, maka pemerintah memiliki kebijakan untuk terus meningkatkan kemampuan UMKM. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM dan pengembangan serta pembinaannya.

Mengembangkan usaha baru bukanlah perkara yang mudah. Ditemui banyak permasalahan dalam membangun jiwa kewirausahaan ataupun memulai dan menumbuhkan usaha baru. Budi Isman, seorang pelatih wirausaha sekaligus pendiri ProIndonesia-Smartpreneur, memberikan pandangannya tentang alasan kegagalan dalam memulai usaha baru. Pertama, wirausaha pemula tidak memegang prinsip 'fokus dan *simple*', memulai dengan satu saja dulu dan fokuskan sumber daya manusia, uang dan waktu untuk membangun pasar produk yang satu tersebut. Godaan untuk mulai membangun produk lain, harus dihindari dahulu. Semakin fokus, maka semakin membuat proses "*simple*"/sederhana. Sementara itu, semakin kompleks usaha, maka semakin memakan energi, waktu dan uang. Kedua, kelemahan pengusaha pemula dalam mengelola *cash flow* (arus kas), nafas dalam bisnis. Banyak usaha yang gagal karena ketidakefisienan pengelolaan dan tidak kuat nafas dalam menyediakan danaoperasional. Ketiga, meskipun saat ini makin banyak peluang, namun kompetisi pun juga semakin banyak, apalagi bila perdagangan bebas telah diimplementasikan. Kecepatan bisnis kerap tidak disertai dengan kecepatan organisasi. Terkadang ketidaksiapan internal perusahaan sendiri, khususnya SDM, bisa membuat bisnis jadi terhambat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya meningkatkan kualitas pengusaha yang ada dan kuantitas pengusaha-pengusaha baru yang handal, tangguh, dan mandiri. Sejalan dengan strategi peningkatan daya nasional, maka untuk bisa bersaing dalam perdagangan global, para pengusaha juga dituntut memiliki karakter

inovatif (SDM yang mumpuni) yang mampu mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pengembangan produk, sehingga dapat dihasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi dan berdaya saing kuat. Kemampuan menciptakan nilai tambah komersial secara konsisten dari inovasi teknologi, baik dalam produk maupun proses, sehingga memiliki keunggulan kompetitif inilah yang disebut dengan teknopreneurship. Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan dalam rangka mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi serta meningkatkan daya saing nasional adalah tidak hanya mendorong tumbuhnya jiwa entrepreneurship, namun juga teknopreneurship.

Inkubator bisnis dapat dikatakan sebagai suatu tempat yang menyediakan fasilitas bagi percepatan penumbuhan wirausaha melalui sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan kemampuan utama usahanya. Pemanfaatan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh inkubator, para pengguna jasa (tenant) dapat memperbaiki sisi-sisi lemah dari aspek-aspek wirausaha. Mengingat permasalahan umum dalam membangun jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kemampuan berwirausaha seperti telah disebutkan di atas, maka pemerintah sebagai penyelenggara dan fasilitator pembangunan ekonomi, perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas wirausahamelalui pendidikan *entrepreneurship*, pelatihan, dan regulasi untuk memudahkan pembukaan usaha baru. Menurut Darwanto (2012) Model umum inkubator bisnis/wirausaha dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Model Penciptaan entrepreneur baru

Pemerintah Republik Indonesia pun menyadari pentingnya penyelenggaraan inkubator wirausaha tersebut. Dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif dan menumbuhkembangkan wirausaha inovatif, telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Riset dan Teknologi pada tanggal 31 Maret 2010. Ruang lingkup dari isi

kesepakatan bersama ini meliputi peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas inkubator bisnis dan teknologi. Kesepakatan juga ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan ruang gerak yang luas bagi berkembangnya inkubator bisnis dan *tenant*-nya, serta meningkatkan koordinasi dan dukungan instansi terkait.

Lebih jauh lagi, untuk mendorong perkembangan inkubator wirausaha, pemerintah telah membuat kebijakan pemerintah berupa Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Dalam Perpres tersebut dijelaskan tentang perlunya wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha yang mampu menghasilkan/menumbuh kembangkan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional. Wirausaha baru yang memiliki karakteristik tersebut dipercaya dapat meningkatkan daya saing nasional, sementara itu wahana yang dimaksud adalah inkubator wirausaha.

Dalam Perpres tersebut dikatakan bahwa inkubator wirausaha merupakan suatu lembaga inovasi berbasis teknologi yang berfungsi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah melalui proses inkubasi terhadap Peserta Inkubasi (Tenant). Dalam Perpres juga dijelaskan bahwa Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi, yaitu wirausahawan atau calon wirausahawan yang dinilai layak mengikuti proses inkubasi.

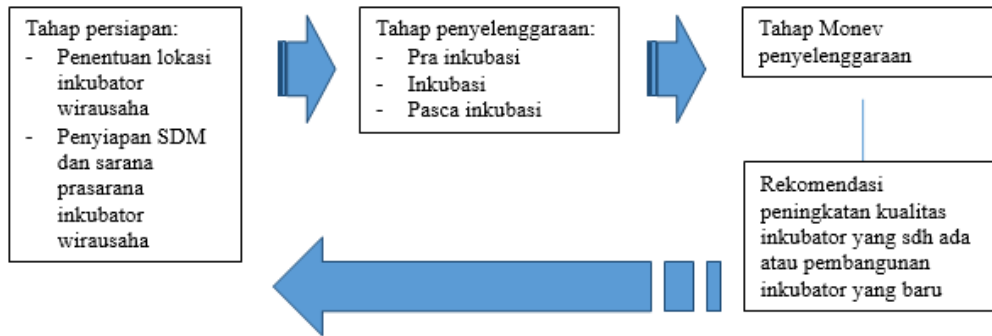
Tujuan dan Sasaran Inkubator Bisnis

Ada dua tujuan pengembangan Inkubator Wirausaha. Pertama, menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, sasaran pengembangan Inkubator Wirausaha adalah (a) penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula (*start-up*) yang berdaya saing tinggi; (b) penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; (c) peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) peningkatan aksesibilitas wirausahawan atau calon wirausahawan untuk mengikuti program Inkubasi; (e) peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola Inkubator Wirausaha untuk memperkuat kompetensi Inkubator Wirausaha; dan (f) pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

Penyelenggaraan Inkubator Bisnis dan Teknologi UMKM Pengolah Sabut Kelapa

Tahapan dan Analisis Situasi Rencana Penyelenggaraan Inkubator Bisnis dan Teknologi UMKM Pengolah Sabut Kelapa di Kabupaten Sumenep

Rencana penyelenggaraan inkubator bisnis dan teknologi pada UMKM pengolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep dapat dibagi ke dalam tiga tahap seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Tahapan Penyelenggaraan Inkubator Bisnis dan Teknologi di Kabupaten Sumenep

Berikut penjelasan tahapan rencana penyelenggaraan incubator bisnis:

1. Tahap persiapan penyelenggaraan

Pemerintah daerah calon penyelenggara incubator bisnis dan teknologi, yaitu Bappeda bidang ekonomi, mempersiapkan pra penyelenggaraan incubator, meliputi:

a. Penetapan rencana lokasi prioritas penyelenggaraan incubator wirausaha dan teknologi.

Berdasarkan pertimbangan ada enam indikator kelayakan penyelenggaraan incubator, yaitu aksesibilitas; ketersediaan penyelenggaraan dan SDM; ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan incubator; kemungkinan dan kelancaran kerjasama dengan pihak terkait; dan kemudahan monev, maka terpilih Kecamatan Dungkek sebagai lokasi ujicoba penyelenggaraan incubator bisnis dan wirausaha di Kabupaten Sumenep.

Analisis situasi terhadap lokasi terpilih (Kecamatan Dungkek):

Kekuatan:

Lokasi kecamatan Dungkek berdekatan dengan Kota Sumenep dan mobilitas barang/jasa dan manusia sangat lancar serta merupakan tempat usaha pengolahan sabut kelapa yang masih eksis sampai saat ini (Bpk. Asnawi) tepatnya di Desa Bicabbi, Dengan menyelenggarakan incubator bisnis dan teknologi di kecamatan ini maka diharapkan:

- Kendala kesulitan akses yang menyebabkan mahalnya biaya operasional maupun penyelenggaraan program dapat dihindari.
- Mengingat bahwa pihak-pihak luar yang akan diajak bekerjasama, maka hambatan kesulitan kerjasama akibat kesulitan akses dapat dihindari.
- Monitoring dan evaluasi dapat dengan mudah dilakukan dengan intensif dan biaya terjangkau.
- Dekat dengan bahan baku, merupakan penghasil sabut kelapa yg paling besar di Kabupaten Sumenep.

Kelemahan:

Mengingat penyelenggaraan ini adalah untuk pertama kalinya, maka semua sumberdaya dan upaya dapat 'difokuskan' kepada proses persiapan dan penyelenggaraan incubator wirausaha dan teknologi. Tingkat keberhasilan diharapkan tinggi mengingat aksesibilitas tidak terlalu menjadi masalah.

b. Penyiapan berbagai sumberdaya sesuai dengan standar dan kriteria penyelenggaraan yang telah ditetapkan perundangan.

Pemerintah mulai mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM), sarana-prasarana, dan kelengkapan kelembagaan penyelenggaraan lainnya:

- Mempersiapkan minimal 3 (tiga) orang pengurus inkubator yang profesional (memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, bekerja penuh waktu, dan memiliki komitmen tinggi menjalankan semua program inkubator wirausaha)
- Mempersiapkan sarana-prasarana inkubator wirausaha, seperti ruangan atau gedung, sekurang-kurangnya untuk ruang kerja tenant, konsultasi, kantor untuk pengurus, serta seperangkat peralatan (komputer, server dan internet) yang memadai untuk sistem informasi.
- Membuka kerjasama awal dengan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam penyelenggaraan inkubator wirausaha. Pihak-pihak yang dimaksud setidaknya adalah lembaga keuangan, baik bank atau koperasi, lembaga riset – perguruan tinggi yang memiliki fokus/jurusan pengembangan kewirausahaan, manajemen usaha, maupun teknologi tepat guna.
- Jika pendanaan pemerintah daerah dalam mengoperasionalkan penyelenggaraan inkubator bisnis dan teknologi sangat terbatas, maka perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan yang bisa menyediakan dana CSR-nya untuk mendukung penyelenggaraan inkubator.
- Semua kerjasama dengan pihak luar harus dengan perjanjian/MOU tertulis.

2. Tahap/Proses Ujicoba penyelenggaraan inkubator wirausaha dan teknologi di salah satu lokasi

Proses uji coba mengikuti prosedur penyelenggaraan inkubator bisnis dan teknologi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Ada 3 (tiga) tahapan dalam penyelenggaraan inkubator bisnis dan teknologi:

- a. Tahapan pra-inkubasi**, meliputi sosialisasi dan rekrutmen/seleksi calon tenant, pelatihan dasar untuk menjaring calon tenant, dan mematangkan gagasan teknologi dan ide yang akan dikomersialisasikan. Yaitu: (1) Calon peserta inkubasi (tenant)diutamakan bagi perseorangan dan/atau badan usaha yang sedang memulai usaha (start-up) atau calon wirausaha. (2) Syarat calon peserta perorangan maupun badan usaha harus memiliki proposal bisnis yang prospektif dan memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan, serta layak diinkubasi. (3) Standar bidang usaha yang bisa dikembangkan adalah usaha yang produktif, prospektif, berbasis teknologi, dan berwawasan lingkungan. (4) Bagi calon peserta yang lulus seleksi, harus menandatangani surat perjanjian Inkubasi dengan penyelenggara Inkubator Wirausaha.
- b. Tahapan inkubasi**. Tahap ini berupa pelaksanaan program-program inkubator dalam membina, melatih dan mengembangkan peserta inkubasi. Bentuk program utamanya adalah pelatihan dan pengembangan ketrampilan, bimbingan dan konsultasi, pendampingan, proses produksi, uji produksi, pemasaran, pameran, temu bisnis, dan pengadministrasian bisnis.

c. **Tahapan paska inkubasi**, adalah proses setelah masa inkubasi selesai. Masa inkubasi ditentukan sekitar 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu tahun, sesuai dengan sifat dari usaha yang diinkubasi. Dalam tahap ini tenant harus menyelesaikan kontrak inkubasi dan membangun jejaring dengan tenant alumni. Sementara itu, penyelenggara harus tetap memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha tenant sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan memberikan konsultasi yang dibutuhkan.

3. Tahap monitoring dan evaluasi (monev) ujicoba penyelenggaraan inkubator wirausaha dan bisnis.

Berbeda dengan monev dalam tahap paska inkubasi yang dilakukan oleh penyelenggara inkubator terhadap para tenant, maka dalam tahap ini adalah monev yang dilakukan oleh tim independen di luar penyelenggara yang menilai keseluruhan penyelenggaraan inkubator bisnis dan teknologi. Dalam peraturan perundangan tentang inkubator bisnis dan teknologi, monev ini dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah daerah. Hasil monev akan menjadi masukan bagi perbaikan/peningkatan kualitas penyelenggaraan inkubator usaha ataupun menambah inkubator usaha baru di masa mendatang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan kondisi eksisting dan kepentingan pelaku UMKM pengolah sabut kelapa melalui *Importance Performance Analysis* (IPA) diperoleh gambaran tentang UMKM pengolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep performnya rendah dan masyarakat maupun pemerintah daerah menganggap ini penting sekali sehingga butuh penanganan dengan segera, yaitu: (1) peningkatan skill UMKM pengolah sabut kelapa, (2) penguatan kelembagaan UMKM pengolah sabut kelapa, (3) penguatan akses terhadap teknologi tepat guna, (4) pendampingan yang intensif (inkubator), dan (5) penguatan akses ke lembaga permodalan.

Model pengembangan UMKM pengolah sabut kelapa mengacu pada hasil kondisi eksisting dan kepentingan masyarakat sehingga terpilih Model Inkubator Bisnis dan Teknologi dalam pengembangan UMKM pengolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep.

Rencana penyelenggaraan inkubator bisnis dan teknologi pada UMKM pengolah sabut kelapa di Kabupaten Sumenep dapat dibagi ke dalam tiga tahap. **Pertama**, tahap persiapan penyelenggaraan yang meliputi (1) penetapan rencana lokasi prioritas penyelenggaraan inkubator wirausaha dan teknologi dan (2) penyiapan berbagai sumberdaya yang sesuai dengan standar dan kriteria penyelenggaraan yang telah ditetapkan perundangan. **Kedua**, tahap ujicoba penyelenggaraan inkubator wirausaha dan teknologi di salah satu lokasi yang menjadi prioritas (prioritas utama). Tahap ujicoba harus mengikuti prosedur penyelenggaraan inkubator wirausaha dan teknologi yang telah ditetapkan oleh perundangan. **Ketiga**, tahap monitoring dan evaluasi (monev) ujicoba penyelenggaraan inkubator wirausaha dan bisnis. Hasil monev akan menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan inkubator wirausaha dan teknologi yang telah ada dan membentuk inkubator wirausaha baru di

lokasi/kecamatan lainnya. Tahapan itu terus berlanjut menjadi sebuah siklus sehingga pada akhirnya seluruh inkubator bisnis dan teknologi di Kabupaten Sumenep terselenggara dengan kualitas dan kuantitas yang terus meningkat.

Saran-Saran

Pemerintah kabupaten Sumenep beserta UMKM pengolah sabut kelapa dapat menerapkan model pengembangan UMKM pengolah sabut kelapa melalui incubator bisnis dan teknologi tepat guna sehingga diharapkan model ini dan pemanfaatan teknologi tepat guna dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumenep. Kemudaiannya diharapkan ada penelitian selanjutnya dengan melakukan analisis terhadap penerapan model pengembangan UMKM pengolah sabut kelapa melalui incubator bisnis dan teknologi tepat guna mengevaluasi efektifitas dan efisiensi atas penerapan model tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro P, N. 2009. Hasil Sampung Tanaman Kelapa. Dimuat di Tabloid Sinar Tani. 22-28 April 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. 2014. Sumenep dalam Angka 2014.
- Blakely, Edward James dan Bradshaw, Ted K. 2002. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, 3rd edition. Sage Publication, Inc. United Kingdom.
- Inpres No. 3 Tahun 2001 : Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Hayter, Roger. 2000. *The Dynamic of Industrial Location: The Factory, The Firm, and The Production System*. John Willey and Sons: New York.
- Indahsari, Kurniyati. 2010. *Perencanaan Pembangunan: Konsep Dasar dan Studi Kasus*. Elmatra Publishing. Yogyakarta
- Muhi, A.H. 2009. Teknologi Tepat Guna (TTG) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. Makalah, disampaikan pada Acara Temu Karya Pendampingan Masyarakat Pedesaan dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 April 2009 dan tanggal 7 Mei 2009.
- Munaf, D.R., T. Suseno, R.I. Janu, dan A.M. Badar. 2008. Peran Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat Daerah Perbatasan. *Jurnal Sosioteknologi Edisi 13 Tahun 7*, April 2008: hal 329 – 333.
- Munir, R dan Fitanto. 2007. *Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif*. LGSP: Jakarta.
- Situmorang, S.H. dan M. Safri. 2011. Urgensi Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk UMKM di Kota Medan. *Jurnal Ekonom*, Vol 14, No 4, September 2011: hal 197 – 208.
- Sulistiyastuti, Dya Ratih. 2004. *Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001*. *Jurnal Ekonom Pembangunan Vol 9*.
- Tambunan, Tulus. 2000. *Development of Small Scale Industries during the New Order Government in Indonesia*. Ashgate Publishing Ltd: England.

- Triamita, Lutviani. 2012. Analisis Konsentrasi Regional Tenaga Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2004-2010. FEB UB. Malang
- _____. 2014. Pengembangan Daya Saing Bisnis Inovatif melalui Pengembangan Kelembagaan Inkubator Bisnis dan Dukungan Pembiayaan, dalam <http://www.ekon.go.id/berita/view/pengembangan-daya-saing.836.html>, diunduh tanggal 12 juli 2014
- Amstrong, Harvey, and Jim Taylor. 2000. *Regional Economics and Policy*, New York: Harvester Wheatsheaf.
- Badan Pusat Statistik. 2011. Sakernas
- Badan Pusat Statistik. 2013. Analisis Sektorl PDRB Kabupaten Sumenep. Sumenep
- Blakely, Edward James dan Bradshaw, Ted K. 2002. *Palnning Local Economooic Development: Theory and Practice*, 3rd edition. Sage Publication, Inc. United Kingdom.
- Dinas Koperasi dan UMKM. 2013. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Usaha Besar di Indonesia. www.depkop.go.id Diakses tanggal 26 April 2014
- Hayter, Roger. 2000. *The Dinamic of Indusrial Location: The Factory, The Firm, and The Production System*. John Willey and Sons: New York.
- Indahsari, Kurniyati. 2010. *Perencanaan Pembangunan: Konsep Dasar dan Studi Kasus*. Elmatara Publishing. Yogyakarta.
- Irawan, Dandan. 2014. Konsepsi Inkubator Bisnis, dalam <http://www.pibi-ikopin.com/index.php/artikel-bisnis/84-konsepsi>, diunduh tanggal 12 Juli 2014
- Kuncoro, Mudrajat. 2008. *Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia*. Harian Bisnis Indonesia. 21 oktober 2008.
- Sadik, Jakfar. 2012. *Karakteristik Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep*. Diaspora Publisher. Malang
- Sulistiyastuti, Dya Ratih. 2004. *Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 9*.
- Tambunan, Tulus. 2000. *Development of Small Scale Industries during the New Order Government in Indonesia*. Ashgate Publishing Ltd: England.
- Triamita, Lutviani. 2012. Analisis Konsentrasi Regional Tenaga Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2004-2010. FEB UB. Malang
- United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) and EcoPlan International Inc. 2005. *The Local Economic Development Series: Promoting Local Economic Development through Strategic Planning*, Volume 1-4. Nairobi, Kenya.
- World Bank. 2011. *Ringkasan Eksekutif Analisa Pengeluaran Publik Jawa Timur 2011*.
- Yustika, Ahmad Erani, 2005. *Perekonomian Indonesia; Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*. Bayu Media, Malang
- Website smartpreneur, <http://smartpreneur.com>, diunduh tanggal 12 Juli 2014